

PENGELOLAAN KESAN SIMBOLIK PRESIDEN JOKOWI

Agus Hitopa Sukma

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Email: agushs862@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of research was to find out the management of President Jokowi's leadership communication in terms of managing the symbolic impression displayed in the one-year period of his governance with Vice President Ma'ruf Amin. The research approach uses cultural studies, with the method of studying the literature of media content, especially political opinions. The results showed that during one government, judging by the management of symbolic impressions, President Jokowi more presents himself as an organizer and entrepreneur, so that it does not stand out too prominently the formal aspects of protocol presidency in his daily acts. The leadership challenge is urban geopolitics, namely the co-optation of the city area into a source of legitimacy opposition. This challenge developed into a latent issue of binary opposition that attacked the identity of the President. The post-truth era news phenomenon contributes to the threat of government legitimacy in cyberspace. In the field of education, the element of character building is still weak in the realm of implementation, so the course of government for one year is shown many breakthroughs, but often colored controversially.

Keywords: *Impression Management, President Jokowi, The Urban Geopolitics*

I. PENDAHULUAN



Gambar 1. Ir. H. Joko Widodo (Presiden ke-7 Republik Indonesia)

Dilihat dari penampilan busananya, Presiden Jokowi memang “berbeda”, seakan tidak mengesankan sama sekali ketaatan protokoler *mainstream* terhadap aspek formalitas yang sangat dominan memakai jas, dasi

dan aksesoris kenegaraan lainnya. Mayoritas hari-hari tugasnya banyak terkesan *casual*, sangat praktis, minimalis dan lebih mencerminkan semangat kerja lapangan dibanding umumnya presiden yang lebih suka memosisikan diri di singgah sana menara gading. Sebagai seorang presiden, tentunya pengelolaan penampilan akan mengundang kontroversial. Namun demikian, terlepas dari unsur penampilan kasual tersebut, Presiden Jokowi merupakan presiden yang menghadapi dinamika berbeda dengan presiden sebelumnya. Selain tuntutan era milenial, digitalisasi, reformasi, pemerintahan Jokowi dihadapkan pada fenomena pemutarbalikan semua perencanaan strategis pembangunan, yakni pandemi Covid-19.

Satu tahun pemerintahan memang tidak mudah. Terlebih lagi kini, pemerintahan Jokowi didera “resesi”, di tengah badai krisis. Menghadapi krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19, tim Jokowi, terus dituntut lebih cerdas (*smarter*) mendayagunakan teknologi bernilai tambah, serta menyiagakan kemungkinan guncangan ekonomi yang lebih besar, untuk berdaya tahan (*resilience*). Ini tentunya tantangan yang tidak mudah.

Sementara itu di belahan dunia lainnya, yang tentunya juga berimbas pada Indonesia, Profesor Klaus Schwab, pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*), mengemukakan, *great reset* jawaban atas krisis multidimensi saat ini. Schwab yang memiliki pengaruh besar dalam khazanah pergulatan pemikiran dan strategi global, antara lain melalui pemikiran revolusi industri 4.0 menyatakan bahwa dunia harus berani memasuki era *great reset*, dalam membangun wahana produksinya. Kini, faktor kecepatan menjadi penentu nasib bangsa. *Great reset* kurang lebih adalah merancang ulang semua desain kebijakan, perencanaan dan strategi ekonomi sesuai dengan *post-covid*, bukan *new normal*. Hal ini tentu membutuhkan energi besar jika harus diterapkan, karena energi bangsa justru tengah intensifnya merancang era *new normal*, yang kata Schwab tidak lagi bisa demikian. Ini tantangan yang mewarnai evaluasi pemerintahan Jokowi-Amin di masa pandemi.

Sekali lagi, kini faktor kecepatan menjadi penentu nasib bangsa. Merujuk kepada Paul Virilio (1932-2018), *dunia yang berlari* adalah gambaran dunia yang paradigma berpikirkannya adalah kecepatan. Ia menyebutnya dengan *dromologi* (berasal dari bahasa Yunani, *dromos* artinya kecepatan, dan *logos* artinya semesta pengetahuan). Kecepatan dan percepatan menjadi sentral kehidupan sosial, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tidak hanya itu, kecepatan bahkan menjadi parameter kemajuan. Artinya, kemajuan tidak hanya dicirikan dengan kebaruan seperti dulu, tapi juga kecepatan. Jokowi sebenarnya sudah membuktikan hal ini. Bagaimana dia memangkas berbagai birokrasi di tahun-tahun awal pemerintahannya, berlanjut sampai hari-hari pemerintahannya. Di masa dulu ada *tax amnesty* misalnya, di kekinian, ada *omnibus law*, yang kesemuanya ada efek “kemampatan” regulasi. Demikian pula pembangunan infrastruktur yang arahnya adalah mempercepat laju distribusi dan mobilisasi. Inilah barangkali *dromo-politik* ala Jokowi. Politik yang mengandalkan strategi percepatan. Barangkali pula inilah tuntutan era yang tidak dapat lagi ditanggalkan.

Lebih lanjut, menurut Michel Foucault (1926-1984), kekuasaan adalah pengetahuan. Artinya, ada hubungan erat yang saling timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan mempengaruhi pengetahuan, pengetahuan juga memengaruhi kekuasaan. Namun, dengan adanya fenomena dromologi seperti saat ini, kata-kata *knowledge is power* agaknya mengalami perluasan makna. *Knowledge* sendiri tidak cukup, ia harus ditambah dengan kecepatan. Maka, dalam konteks kekinian, *quote* Foucault lebih tepat untuk dimaknai dengan “*power is speeding knowledge*” (*kekuasaan mempercepat laju pengetahuan/ produksi pengetahuan*).

Sesuai apa yang dikatakan Foucault, di pemerintahan Jokowi banyak sekali memproduksi pengetahuan melalui legitimasi kekuasaan, misalnya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Kesehatan, Kartu Cipta Kerja dan demikian banyak kartu yang kesemuanya untuk memacu kecepatan dan percepatan program pemerintahan. Di banyak bidang, diciptakan pula trigger kecepatan itu, kampus merdeka, merdeka belajar, digitalisasi, e-government dan banyak lagi.

Menurut premis Paul Virilio, kecepatan menjadi ciri mutlak kemajuan sehingga membentuk progres dalam tempo tinggi. Dalam domain kebangsaan dan gelombang industrialisasi, progres dalam tempo tinggi itu pada hakikatnya merupakan bentuk *dromokratik*. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terletak pada kecepatan. Terkait *dromokratik*, setiap negara kini mencari konsep dan membuat program akselerator untuk mengatasi pandemi beserta dampak luasnya. Program akselerator adalah langkah intens, cepat, dan *membumi* sehingga pengalaman yang harusnya diakumulasi bertahun-tahun dapat dirasakan atau dimanfaatkan dalam waktu beberapa bulan saja. Di dalamnya, dunia tengah serius membuat akselerator

sosial maupun akselerator korporasi yang dapat memberikan solusi untuk meningkatkan inovasi terbuka dan saat bersamaan mencetak dan meningkatkan kemampuan usaha rintisan segala sektor. Ini pula yang tengah menjadi misi pemerintahan Jokowi sejak sebelum masa pandemi.

Di bidang lain, yang tidak kalah urgensinya untuk disoroti adalah bidang MSDM (manajemen sumberdaya manusia). Lagi-lagi Jokowi membuat program universal revolusi mental. Meskipun terkesan *layu sebelum berkembang*, tetapi revolusi mental ini banyak merasuk ke dalam dunia birokrasi dan akademik. Di satu sisi, diskursus revolusi mental mampu mengelaborasi ABG (*academics, businesses, dan government*), di sisi lain, seakan *kehabisan amunisi* di ranah aplikasi. Berdasarkan indeks Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2018, Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara, masih kalah dengan negara tetangga. Sebagai perbandingan, Malaysia di peringkat 27, Filipina di posisi 54, dan Thailand di peringkat 70. GTCI merupakan laporan komprehensif tahunan yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur bagaimana suatu negara menyediakan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing mereka. Jadi, berdasarkan indeks ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih jauh dari kompetitif, terlebih lagi keunggulan kompetitif.

Geopolitik Urban

Sesuai dengan judul yang penulis pilih, maka, kata-kata kunci dari pembahasan ini adalah: Jokowi, geopolitik urban dan dromokratik. Jokowi yang dimaksud sebagai representasi pemerintahan Jokowi-Makruf Amin beserta tim pemerintahan yang lebih populer terpusat pada figur Jokowi sebagai Presiden. Geopolitik, merupakan strategi Jokowi dalam memetakan politiknya atau komunikasi politiknya, dalam melihat wilayah sebagai strategi pencapaian kemajuan dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari wacana pemindahan ibukota yang sudah sampai pada bahasan nasional.

Jika ada penyebutan urban dalam geopolitik tersebut, maksud penulis adalah pertarungan pemerintahan Jokowi yang banyak menemukan kontroversi pada wilayah kota. Banyak peristiwa besar yang membuktikan hal itu, misalnya Demo 212, anarkisme, konflik budaya, sampai pada politik *face to face* dengan pimpinan ibukota Jakarta, Anies Baswedan. Selanjutnya soal dromokratik, seperti yang telah penulis kemukakan di bagian awal, bahwa dromokratik merupakan politik yang berusaha menempatkan “kecepatan” sebagai legitimasi kekuasaan. Perjalanan aksi komunikatif dan aksi strategis dalam konteks dromokratik selalu didasarkan atas alasan kecepatan. Jadi, dromokratik dapat dilihat sebagai strategi, tetapi di sisi lain dapat dilihat sebagai *driving force* teknologi yang kemudian membentuk budaya instan, sehingga menjadi tantangan dan tuntutan. Bagaimanapun, semua ini sangat melekat pada perjalanan pemerintahan 1 tahun Jokowi-Amin.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah *cultural studies*. Metode penelitian adalah telaah pustaka, berupa opini-opini politis *Kompas.Com* selama periode satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Secara umum, pustaka yang dipilih adalah yang berkaitan dengan pernyataan induktif diikuti oleh dasar-dasar fakta diskursus kultural politik, dilanjutkan dengan gambaran intersubjektif bangsa dalam era pemerintahan Jokowi-Amin. Di dalam pustaka yang dimaksud juga diklasifikasikan wacana-wacana kunci dari sisi kapabilitas, eksternalitas dan internalitas. Dalam hal ini, kapabilitas yang penulis maksud adalah kapabilitas Jokowi secara personal sebagai *leader* jika dibandingkan dengan para pendahulunya sebagai kepala negara. Adapun pustaka lain adalah pustaka-pustaka *cultural studies* sebagai alat analisis eksternal, bagaimana situasi eksternal pemerintahan yang menjadi “tekanan” penetapan dan proses keputusan. Selanjutnya internalitas, bagaimana penulis melihat reaksi pemerintahan Jokowi dalam melegitimasi dan menginstitusionalisasi “tekanan” tersebut dalam praktik manajemen kenegaraan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gaya Komunikasi Kepimpinan Politik Jokowi

Secara umum jika melihat Presiden 1 sampai sekarang, versi penulis, dapat dipetakan dalam gaya *leader, creator, trainer, organizer* dan *entrepreneur*. Ciri khas dari *leader* adalah kekuatan instruksinya dalam hal-hal strategis yang tidak terbantahkan. *Creator* adalah figur independen yang tidak memiliki basis massa tetapi memiliki visi dan misi masa depan bangsa yang brilian, meskipun hanya sesuai dengan bidang keahliannya. *Trainer*, memiliki kemampuan *pathos*, yakni mudah membangkitkan *mood*, atmosfer dan emosional khalayak. Citranya sebagai sosok yang berwawasan luas, cerdas dan intelek tampak dari gaya komunikasi publiknya. Selanjutnya *organizer*, merupakan tipe pelobi ulung, yang potensi besarnya menjadi figur pemersatu. Yang

terakhir adalah *entrepreneur*, gaya ini tampak pada perhatiannya yang besar terhadap kanal-kanal ekonomi, dengan visi keuntungan di baliknya, singkatnya semua sektor harus menunjang tumbuhnya ekonomi. Ini juga merupakan *urban style* dari Jokowi, yang terus melakukan penetrasi ke pedalaman, tetapi kurang memperhatikan unsur kelestarian lokal yang sering kali terkalahkan.

“Jokowi bukan *leader*, karena ia adalah petugas partai!”. Kalimat yang terkesan parodi ini sebenarnya tidak dapat dikatakan salah, karena dibandingkan pemimpin sebelumnya, Jokowi bukanlah pemimpin, atau pucuk pimpinan partai yang memiliki kekuasaan kendali secara penuh. Hal ini berbeda dengan Sukarno, Suharto, Gus Dur, Megawati sampai SBY. Mereka semua merupakan pucuk pimpinan dari pengikut fanatik segmentasi publik tertentu, sehingga dalam konteks seminimal apa pun karisma kepemimpinan itu tetap terlihat.

Jika harus dipetakan, kurang lebihnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sukarno : *leader, creator, trainer, organizer.*
- 2) Suharto : *leader, trainer.*
- 3) Habibi : *leader* (dalam korporasi), *creator, trainer.*
- 4) Gus Dur : *leader, creator, trainer.*
- 5) Megawati : *leader.*
- 6) SBY : *leader, trainer, organizer.*
- 7) Jokowi : *organizer dan entrepreneur.*

Pemetaan ini menunjukkan bahwa Jokowi bukan sosok superior yang mampu mempengaruhi kekuatan mayoritas, tetapi dia memiliki kelebihan *organizer* yang terbukti dalam beberapa kesempatan sangat berhasil, misalnya diangkatnya rival Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pengacara FPI sebagai anggota PDI Perjuangan serta Zulkifli Hasan yang berhasil menjadi simpatisannya.

Yang unik dari Jokowi adalah tipe *entrepreneur*-nya. Dilihat dari peta di atas tampak bahwa inilah tipe *entrepreneur* pertama kali Presiden Indonesia. Sebenarnya insting *creator* itu ada, melalui mobil esemka, namun visi teknologi yang biasanya menyertai seorang *creator* tidak maksimal, sehingga visi hemat energi terbukti masih gagal. Terlepas dari itu, Jokowi dalam satu tahun ini semakin lemah menunjukkan dirinya untuk bisa dikatakan *leader*.

3.2. Geopolitik Urban sebagai Tantangan

Refleksi lainnya adalah tantangan Jokowi dalam mentransformasikan desa menjadi kota. Jokowi paham bahwa kota merupakan lingkungan yang sangat ramah bagi tumbuhnya berbagai gagasan baru dan wadah bagi mereka untuk menciptakan pembaharuan. Setahun Jokowi, persoalan sosial yang timbul pun lebih kompleks. Kesenjangan sosial kota tampak sangat lebar sehingga memunculkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa dipinggirkan. Kota, bahkan ibu kota, kemudian menjelma menjadi ranah bagi konflik maupun perselisihan.

Jika dilihat pembangunan infrastruktur kota, pertumbuhan dan pembangunan kota-kota secara umum tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Geopolitik Jokowi hanya tampak pada sarana fisik, namun belum terlihat visi misi perencanaan arah kearifan lokal di wilayah tersebut. Hasilnya, Indonesia dengan segala keunikan dan keragaman budaya desanya, justru tidak mampu bersaing dengan negara tetangga. Sektor pariwisata masih kalah jauh dengan Malaysia, Thailand, Vietnam apalagi Singapura.

Di sisi lingkungan, geopolitik urban Jokowi juga tampak kewalahan. Di antaranya soal pengelolaan dan edukasi spiritual masyarakat untuk cerdas dalam membuang sampah. Dari hari ke hari, sampah justru berkembang menjadi penyebab bencana. Dari sisi problematika klasik ini, kesadaran geopolitik masih belum menemukan titik terangnya, misalnya dana 1,2 triliun untuk revitalisasi Sungai Citarum yang melibatkan banyak Perguruan Tinggi, yang masih juga belum berhasil. Analisa kritisnya adalah bahwa paradigma pembangunan tidak berpijak pada kesadaran geopolitik yang kokoh.

Tantangan 1 tahun Jokowi-Amin juga banyak diwarnai maraknya kota dalam politik identitas. Warga kota-warga kota berkumpul dan berinteraksi dengan kelompoknya yang memiliki afiliasi suku maupun daerah asal. Hal ini menjadi tantangan dalam membentuk kewargaan kota (*citizenship*). Di Jakarta, ada FBR, Alumni 212, FPI dan sejenisnya, yang sanggup memobilisasi massa dalam memberikan tekanan-tekanan politis. Pada sisi ini kemampuan Jokowi sebagai *organizer* terlihat lemah. Kemungkinan dapat dikritisi bahwa kemampuan *organizing* itu efektif jika terdapat *bargaining of power*. Tanpa itu, di satu pemerintahan ini Jokowi

menyisakan peta-peta identitas kedaerahan yang makin lebar, misalnya protes warga Papua, protes warga Padang, yang tersulut akibat penyebutan identitas.

Jokowi-Amin juga dituntut berpikir keras, karena terpaan informasi dan komunikasi yang terus tumpang tindih, muncul berita yang cepat berganti. Satu kasus belum selesai, sudah diberitakan kasus yang lain. Dalam aspek keberagaman, paradigma kecepatan juga telah menjangkiti kehidupan umat. *Ulama dikriminalisasi! Penusukan ulama! Rekayasa orang gila! Ceramah dicekal!* dan sebagainya, sebagai fakta aktual yang terus mendera. Seakan-akan pemerintahan Jokowi, tidak senang dengan ulama (tertentu).

Sampai di sini, geopolitik urban terus menggerus kapabilitas Jokowi. Untungnya, geopolitik pedesaan justru banyak berkontribusi positif. Masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Jawa Tengah yang masih dominan unsur pola pedesaannya secara signifikan mendukung kebijakan Jokowi. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan Jokowi sebagai *organizer* dalam memanfaatkan basis agama kultural yang masih dominan di wilayah tersebut melalui figur Makruf Amin.

3.3. Era *Post-truth* sebagai Ancaman Delegitimasi

Dalam konteks logika dromologi, fenomena penyebaran *hoaks* yang lebih cepat ketimbang berita faktawi bisa dibaca sebagai konsekuensi logis kejayaan prinsip kecepatan dalam realitas masyarakat *postmodern*. Realitas ini menjurus pada tantangan pemerintahan Jokowi pula, yakni adanya fenomena *post-truth*. Dengan bantuan media sosial, *post-truth* ditandai dengan eksplosivitas emosi dan perasaan, mengalahkan fakta dan data (McIntyre, 2018). Berita bohong dengan mudah dapat disebarluaskan dengan kecepatan dan daya jangkauan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan dorongan emosi, para pengguna media sosial kini dengan mudah melupakan prinsip verifikasi, hilang nalar, *grusa-grusu* dan terburu-buru ingin menjadi yang pertama mengabarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya, inilah era dromologi kebohongan. Celaknya, dalam masyarakat *post-truth*, logika dromologi kebohongan kerap dijadikan alat propaganda demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sampai saat ini Jokowi dengan berbagai strategi defensifnya masih belum efektif. UU ITE yang menjadi penghadang pemroduksi pesan kebohongan, sampai 1 tahun pemerintahan ini, belum menunjukkan hasil signifikan. Kebohongan dan kebenaran itu semakin sulit dicari batas jelasnya.

Pemerintahan Jokowi juga diwarnai dengan terciptanya perpecahan dalam masyarakat, tersebarnya rasa tidak percaya, bahkan dukungan data masih dianggap sebagai rekayasa. Betapa data penambahan Covid-19 tidak dihiraukan oleh masyarakat luas menjadi bukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat belum menggembirakan Jokowi. Artinya, perangkat hukum yang dirancang Jokowi untuk memberikan efek jera, sanksi, dan risiko terkait dengan penyebaran berita bohong di media sosial masih dianggap tidak tegas. Hal ini kemudian terkait dengan penegakan hukum era Jokowi di satu tahun pemerintahannya masih belum banyak memberikan kontribusi terhadap fondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.4. Oposisi Biner sebagai Ancaman Laten

Di awal keterpilihannya, pasangan Jokowi-Amin sudah menyuburkan sentimen oposisi biner di seluruh wilayah Indonesia. Konstruksi oposisi biner itu terutama dibangun atas dasar emosionalitas agama. Memori oposisi biner ini sampai saat ini belum juga mampu dihilangkan, misalnya *cebong vs kampret*, pancasilais vs PKI, pro Islam vs anti Islam, pro Cina vs anti Cina, dan sebagainya. Di sepanjang pemerintahan, Jokowi kerap menemui hal ini, terus didaur ulang, bahkan oleh para pemuka agama.

Fenomena terkini dengan banyaknya baliho yang bergambarkan Habib Rizieq yang mengesankan bahwa beliau adalah pemimpin umat yang anti PKI, figur Pancasilais, bahkan akan hadir sebagai penyelamat negara, tentunya menjadi fenomena oposisi biner yang tidak dapat dibendung oleh Jokowi. Bagaikan sebuah tanda yang dirangkai dengan tanda yang lain, mitos politik bahwa pemerintahan ini zalim juga cukup berani disuarakan. Inilah fenomena dromokratik, ketika bangunan demokrasi tidak dibangun atas dasar argumen tetapi atas dasar sentimen. Tampaknya Jokowi belum menemukan strategi yang tepat untuk menangkal hal ini, kecuali mengandalkan klarifikasi sporadis dari orang-orang yang simpatik padanya.

3.5. Politik Pendidikan yang Lemah di Bagian Implementasi Karakter

Politik pendidikan sebenarnya adalah isu lama, yakni terjadi ketika Orde Baru. Konten pendidikan banyak berisi konstruksi pembangunan negara, keberhasilan program-program negara dan narasi masa depan

kemakmuran. Sayangnya wacana politik pendidikan itupun juga terjadi pada pemerintahan Jokowi, misalnya peluncuran fenomenal program pendidikan kampus merdeka dan merdeka belajar. Program ini sebenarnya banyak mendapatkan penentangan, karena dianggap sangat dekonstruktif terhadap idealisme pendidikan itu sendiri. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga masyarakat yang kemudian mengundurkan diri untuk tidak tergabung dalam sukseksi program merdeka belajar. Namun demikian, jalur birokrasi ini akhirnya banyak diterima dengan berbagai alasan dan legitimasi tuntutan era.

Bagaimanapun, dari sisi politik, program merdeka belajar adalah strategi percepatan. Sayangnya, program percepatan melalui konversi tidak disertai oleh pola pendidikan yang tepat dalam pembentukan karakter. Serangkaian program seperti Sosialisasi 4 Pilar, Pembinaan Ideologi Pancasila, Revolusi Mental, Bela Negara terkesan sangat temporal, tidak mengandung *sustainable development* atau *continuous development* sesuai pengembangan sumber daya kompetitif. Akibatnya, pelajar tidak lagi memiliki niat idealis menempuh pendidikan secara normal sebagaimana biasanya. Mereka lebih menginginkan instan *ketimbang* harus berproses dalam waktu relatif panjang dan melelahkan. Pola pendidikan kemudian terbangun atas orientasi kerja. Seseorang dapat dikatakan sukses manakala bisa bekerja, menghasilkan materi, dan memperbaiki status sosial.

Jadi, pendidikan karakter era Jokowi nyaris gagal. Pendidikan yang sejatinya diberlakukan untuk memanusiasikan manusia (*human relations*), membentuk karakter unggul, berakhlak, berintegritas, bertanggung jawab, serta mewujudkan pribadi berkualitas akhirnya berubah menjadi ajang pembentukan pribadi hedonis. Pelajar tidak lagi dibimbing berdasarkan asas pembelajaran moral, tapi dididik sebagai manusia pekerja. Akibatnya, kompetensi pelajar kita cenderung memiliki kapasitas “rendah”. Mereka menjadi buruh pabrik yang hanya memiliki kemampuan sebagai pengabdikan terhadap kaum kapital, tidak memiliki kecakapan menciptakan peluang, dan pemikiran-pemikiran jernih yang dapat melahirkan gagasan-gagasan inovatif.

IV. PENUTUP

Satu tahun pemerintahan Jokowi-Amin, seyogianya membangun dan mengembangkan kesadaran geopolitis yang kokoh di dalam bidang perencanaan kota. Dengan kesadaran geopolitik tersebut, kita bisa mulai menata ulang sistem-sistem perencanaan kota yang ada, supaya sesuai dengan keadaan wilayah yang dimiliki. Jokowi pun bisa menata ulang kultur kesadaran sebagai bangsa, supaya juga sejalan dengan keadaan geopolitik yang kita punya. Jika *mind set* kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat ekonominya, seyogianya Jokowi perlu meninjau ulang. Dalam konteks Indonesia, atau dunia barangkali, kemajuan suatu bangsa diukur dari sejauh mana bangsa itu memiliki identitas yang jelas dan tegas, terkait dengan ekosistemnya (alam maupun sosial). Jika hal ini sudah selesai, langkah berikutnya adalah membangun seluruh sistem perencanaan kota yang hidup bersama dan kultur yang sesuai (kompatibel) dengan keadaan wilayah tersebut. Kemajuan ekonomi hanyalah konsekuensi logis dari kejelasan dan ketegasan identitas nasional suatu bangsa.

Satu tahun pemerintahan Jokowi-Amin tidak sepenuhnya gagal, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu tidak mengherankan jika survei kepuasan publik menunjukkan kisaran angka 50 persen. Manajemen informasi publik setidaknya menjadi pertarungan di saat pandemi Covid-19. Pengelolaan informasi terbukti tidak efektif, sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Jokowi memang bukan tipe pemimpin *leader*, yang pesan strategisnya dipatuhi secara vertikal. Namun demikian, celah *organizer* Jokowi masih berpeluang, jika pencitraan personal dapat dibangun. Setidaknya popularitas, kapabilitas, akuntabilitas dan akseptabilitas. Geopolitik “menghindar” dari Jakarta dengan memindahkan ibu kota seperti halnya harus di-*reset* ulang, sebaliknya manajemen informasi publik yang tegas, jelas, cerdas dan tuntas harus diterapkan di tengah fenomena dromokratik masyarakat kota.

Sebagai pemimpin negara, Jokowi juga sangat penting membangun kewibawaan, setidaknya dari performansi pribadi. Penampilan Jokowi yang kontemporer sebenarnya kontraproduktif terhadap citra *leader* yang sedang dia bangun. Gaya *entrepreneur* tidak harus menghilangkan penampilan elegan sebagai pucuk pimpinan negara yang memang dituntut piawai dalam *impression management*.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, Samuel A., 2000. *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Jakarta: Qalam.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia Yang Dilipat: Menembus Batas-batas Budaya*. Jakarta: Jalasutra.

Sasongko, Bimo Joga (Ketua Umum IABIE, Lulusan North Carolina State University, Amerika Serikat).
“Haktenas dan Dromokratik”. <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/gevfun1825000/haktenas-dan-dromokratik>.

www.kompas.com nasional

www.lemhanas.go.id